



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.13, No.2, Desember 2016

OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

- Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia
- Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah
- Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan
- Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa
- Otoda dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah

RESUME PENELITIAN

- Masa Depan Partai Islam di Indonesia
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia

REVIEW BUKU

- Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 13	No. 2	Hlm. 137-275	Jakarta, Desember 2016	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------



Mitra Bestari

Penanggung Jawab

Pemimpin Redaksi

Dewan Redaksi

Redaksi Pelaksana

Sekretaris Redaksi

Produksi dan Sirkulasi

Alamat Redaksi

ISSN

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam, serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2P-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2P-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2P-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Bahtiar Effendy (*Ahli Kajian Politik Islam*)
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Pertahanan dan Hubungan Internasional*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Prof. Dr. Tirta Mursitama (*Ahli Kajian Internasional*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN, Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Nico Harjanto, Ph.D (*Ahli Kajian Perbandingan Politik*)
Dr. Philips J. Vermonte (*Ahli Kajian Pemilu dan Pemerintahan*)
Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA (*Ahli Politik Internasional, Migrasi, ASEAN*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Politik Luar Negeri dan Perbatasan*)

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Adriana Elisabeth, Ph.D (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Otonomi Daerah dan Desa*)

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)
Athiqah Nur Alami, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian Perbatasan, ASEAN dan Hubungan Internasional*)

Esty Ekawati, S.Sos., M.IP
Devi Darmawan, S.H
Anggih Tangkas Wibowo, MMSi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id

1829-8001

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i–ii
Catatan Redaksi	iii–iv
Artikel	
• Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia <i>Kadek Dwita Apriani dan Irhamna Irham</i>	137–148
• Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah <i>Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady</i>	149–166
• Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan <i>Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu</i>	167–191
• Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa <i>Nyimas Latifah Letty Azizi</i>	193–211
• Otoda dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah <i>R. Siti Zuhro</i>	213–225
Resume Penelitian	
• Masa Depan Partai Islam di Indonesia <i>Moch. Nurhasim, dkk</i>	227–244
• Problematisasi Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia <i>Nostalgawan Wahyudhi, dkk</i>	245–260
Review Buku	
• Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah <i>Yusuf Maulana</i>	261–268
Tentang Penulis	269–270
Pedoman Penulisan	271–275

CATATAN REDAKSI

Reformasi tahun 1998 membawa dampak pada pelaksanaan Otonomi di sejumlah daerah di Indonesia. Dengan menjalankan pemerintahan secara otonom, diharapkan daerah mampu menjalankan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah persoalan yang ditimbulkan selama Otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun implementasi dan pengawasannya. Sehingga, harapan dengan adanya otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun justru sebaliknya, banyak daerah tidak mampu membawa daerah kepada kesejahteraan, dan bahkan terjebak pada pragmatism politik akibat efek Pilkada Langsung yang diterapkan sejak tahun 2005.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Otonomi Daerah, Desentralisasi, pembangunan desa dan konteks sosial ekonomi yang memunculkan perempuan kepala daerah. Artikel pertama ditulis oleh Kadek Dwita Apriani dan Irhamna tentang “Respon Publik Terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia” mengurai tentang model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat.

Artikel kedua dengan judul Konteks Sosial Ekonomi: Kemunculan Perempuan Kepala Daerah yang ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih.

Artikel berikutnya, “Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi” tulisan La Husen Zuada dkk membahas mengenai praktek oligarki di Wakatobi. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahaan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah dan pada akhirnya bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

Artikel keempat yang ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Azis tentang “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa” menguraikan tentang persoalan alokasi pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Adapun tulisan R. Siti Zuhro yang berjudul “Otodana dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah” menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam era Otonomi Daerah. Permasalahan serius ketidakharmonisan hubungan pusat dan daerah tak cukup dijawab melalui perbaikan UU Pemda, tapi lebih penting dari itu adalah adanya political will dan political commitment dari para stakeholders otodana untuk konsisten

menjalankan amanah UU Pemda, khususnya pasal tentang binwas dan penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus konsisten dalam menjalankan peraturan. Sebaliknya, pemerintah daerah tak perlu resisten berlebihan dalam merespons kebijakan pusat yang dianggap merugikan. Karena itu, penting bagi masing-masing pihak untuk memperbaiki pola komunikasi, sinergi dan koordinasi agar tercipta relasi pusat-daerah yang harmonis.

Tinjauan buku yang ditulis oleh Yusuf Maulana yang berjudul “Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah” membahas mengenai persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun.

Selain lima artikel dan satu tinjauan buku diatas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama, yang ditulis oleh Moch. Nurhasim berjudul “Masa Depan Partai Islam di Indonesia” menggambarkan peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkn kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

Artikel kedua ditulis oleh Nostalgiawan Wahyudi yang berjudul “Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia” yang menguraikan fenomena “backward bending process” dimana gejolak politik dan regime change di beberapa negara Timur Tengah tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi dan kajian mengenai Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pembangunan Perdesaan di Indonesia. Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 303:324.998

Kadek Dwita Apriani dan Irhamna

**RESPON PUBLIK TERHADAP MODEL
PENGANGGARAN PARTISIPATIF
DALAM PEMBANGUNAN DESA: STUDI
TIGA PROVINSI DI INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 137-148

Model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Dua tahun berjalan, wacana tentang program ini lebih banyak berkaitan dengan hal teknis seperti perbedaan data jumlah desa; rekrutmen pendamping desa; atau syarat pencairan dana desa. Oleh sebab itu program ini dinilai kurang mendapat respon dari publik dalam arti luas sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program yang dirancang dengan azas partisipasi dan pemberdayaan ini. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe deskriptif. Sampel yang diambil di masing-masing provinsi berjumlah 800, sehingga MoEnya di kisaran 3%. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa lebih dari 50% responden tidak mengetahui tentang program Dana Desa, sehingga jumlah mereka yang berpartisipasi dalam program tersebut juga lebih rendah. Dari mereka yang mengetahui perihal program Dana Desa tersebut, hanya sekitar

53% yang menilai bahwa pemanfaatan Dana Desa di lingkungan tempat tinggalnya tepat sasaran. Pengetahuan dan penilaian masyarakat di tiga wilayah Indonesia tentang program dana desa tersebut berkaitan dengan budaya masyarakatnya yang tercermin dalam indikator intensitas mengikuti rembug warga untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggalnya. Makin tinggi intensitas mereka mengikuti rembug warga, maka makin besar kecenderungan responden untuk mengetahui perihal Dana Desa dan memberi penilaian positif terkait ketepatan pemanfaatan Dana Desa di lingkungan sekitarnya.

Kata kunci: dana desa, anggaran partisipatif, respon publik

DDC: 303:324.998

Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady

**KONTEKS SOSIAL EKONOMI
KEMUNCULAN PEREMPUAN KEPALA
DAERAH**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 149-166

Tulisan ini bertujuan melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih. Tulisan ini menemukan bahwa jumlah perempuan kandidat

kepala daerah maupun jumlah perempuan terpilih terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah universitas yang banyak dan rata-rata tingkat akses internet yang tinggi seperti di Jawa. Oleh karena itu, tulisan ini menggarisbawahi dua hal: *pertama*, perempuan kepala daerah dapat muncul dalam kondisi sosial ekonomi apapun; *kedua*, persebaran berbagai gagasan baru dan informasi melalui universitas dan media internet menjadi kunci peningkatan jumlah perempuan kepala daerah.

Kata Kunci: sosial ekonomi, universitas, internet, perempuan kepala daerah.

DDC: 351.17

Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu

**DESENTRALISASI DAN OLIGARKI
PREDATOR DI WAKATOBI:
PERAN OLIGARKI DAN ELIT PENENTU
DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 167-191

Artikel ini menguraikan tentang praktek oligarki di Wakatobi. Keunggulan pariwisata yang dimiliki Wakatobi menjadikan daerah ini sebagai lahan bisnis paling menjajikan. Potensi ini menjadi incaran para pengusaha, tidak terkecuali para elit politik. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahaan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah. Di era otonomi daerah, elit politik dan elit ekonomi di Wakatobi merupakan elit penentu, diantara mereka bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

Kata Kunci: Desentralisasi, Oligarki Predator, Elite Penentu, Pembangunan Perdesaan, Wakatobi

DDC: 352.4

Nyimas Latifah Letty Aziz

**OTONOMI DESA DAN EFEKTIVITAS
DANA DESA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 193-211

Lahirnya UU No.6/2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: otonomi desa, efektivitas, dana desa

DDC: 352.14

R. Siti Zuhro

**OTODA DALAM UU PEMDA BARU:
MASALAH DAN TANTANGAN
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 213-225

Setelah 16 tahun menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah, hasil tidak menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah daerah di beberapa daerah telah terbukti mampu inovasi dalam memberikan pelayanan publik, jumlahnya masih minim dibandingkan dengan jumlah daerah mengalami stagnasi dalam perkembangan mereka. Ada sekitar 122 kabupaten masih dikategorikan sebagai berkembang. Hukum 23/2014, menggantikan hukum 34/2004 tentang pemerintah daerah, adalah hukum mengikat daerah dan secara signifikan lebih menuntut kinerja. Meskipun masih dipertanyakan, hukum ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih baik untuk sinergi dan kerjasama antar daerah, meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, mempromosikan inovasi dalam pelayanan publik dan membangun kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: desentralisasi, otonomi daerah, pemerintah daerah, pelayanan publik.

DDC: 324.23

Moch. Nurhasim

MASA DEPAN PARTAI ISLAM DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 227-244

Keberadaan partai politik Islam bukan sekedar penanda tumbuh suburnya pluralitas politi di Tanah Air, namun jauh dari itu, pluralitas ke-Indonesiaan tidak ada artinya tanpa ke-Islama di dalamnya. Oleh karena itu, partai-partai Islam tetap relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai saluran aspirasi dan kepentingan umat Islam, melainkan juga sebagai bagian dari pluralitas dan ke-Indonesiaan itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkn kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi

Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

Kata Kunci : Partai Politik, Partai Islam, Demokrasi, Pemilu

DDC: 320.962.4

Nostalgawan Wahyudhi

PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI MAROKO, SUDAN, DAN SOMALIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 245-260

Riset ini diformulasikan untuk meneliti perkembangan kekuatan politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia paska Arab spring. Berdasarkan riset tahun 2014, kami menemukan fenomena "*backward bending process*" dimana gejala politik dan *regime change* di beberapa negara kasus sebelumnya justru tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah authoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dibanding penelitian sebelumnya, dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter. Penelitian ini membuktikan fenomena *Arab exceptionalism* terjadi. Budaya dan sistem politik di tiga negara kasus tidak memberikan ruang yang cukup bagi tumbuhnya iklim demokrasi.

Kata kunci: Politik Islam, Arab spring, Demokrasi

DDC: 307.72

Yusuf Maulana

**MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA
DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 261-268

Persoalan yang melingkupi desa cukup kompleks. Terutama persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun

Kata Kunci : Desa, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kelembagaan.

DDC: 352.14

Kadek Dwita Apriani dan Irhamna

***PUBLIC RESPONSES TOWARDS
PARTICIPATORY BUDGETING MODEL
IN VILLAGE DEVELOPMENT: CASE
STUDIES IN THREE PROVINCES IN
INDONESIA***

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 137-148

Participatory budgeting in this article refer to village development through village fund. One of the nine development priorities by the Joko Widodo's Government. However, at their second year after implemented, the discourse of this program was merely related to techincal constraint such as the difference of villages number, the recruitment of village assistants, or how the fund being processed. Therefore, this program was not getting any significant responses from the public, which affected the level of public participation, even when empowerment and participation became the main principles. This research aims to describe public responses towards village fund in three provinces which represented three parts of Indonesia; Banten, Gorontalo, and West Papua. This research use descriptive-quantitative method. There are 800 samples that being taken from each province, with 3% MoE. This research finds that more than 50% of respondents did not have any information about the village fund, therefore the numbers of society who actively engaged in the program is low. There only 53% of respondents who agreed that the village fund was used correctly. Public's knowledge and judgement in three provinces are related to their culture which reflected from their intensity to be involved in public consultation or hearing. The higher their intensity to be involed, the greater

the respondents' tendency to be aware of village fund, and resulting a positive value about the pertinency of village fund.

Kata kunci: village fund, participatory budgeting, public responses

DDC: 303:324.998

Kurniawati Hastuti Dewi and Ahmad Helmy Fuady

***SOCIO ECONOMIC CONTEXT OF
INDONESIAN WOMEN PATH
TO LOCAL POLITICS***

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 149-166

This paper aims to see possible pattern of socio-economic conditions that may contribute in facilitating the rise and victory of female leaders, particularly in the December 2015 local direct elections. This paper reveals that, human development index, poverty rate, and gini ratio of a region did not strongly correlate with the number of female leader candidates, nor with the number of the elected female leaders. This paper also shows that the number of candidate and elected female leaders is concentrated in areas which have large number of universities and high proportion of internet access, such as Java. This paper highlighted two important points: first, female leader candidates can emerge and be elected from various socio-economic conditions of region; second, flows of ideas and information through universities and internet access are important keys to the rise and victory of female leaders in local politics.

Keywords: socio-economic condition, university, internet, female local leader.

DDC: 351.17

Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu

**DECENTRALIZATION AND OLIGARCHY
PREDATOR IN WAKATOBI: THE ROLE OF
OLIGARCHY'S AND ELITE'S STRATEGIC
IN RURAL DEVELOPMENT**

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 167-191

The present article discuss about the practice of oligarchy in Wakatobi. Wakatobi has attracted lots of tourist in recent past and tourism has become one of the major source of bussiness in this area. The tourism industry guarantees not only employment in the region but is also a major way to gain political power. In this era of Wakatobi the regional autonomy is controlled by political elites and entrepreneurs. It is these political elites and the enterprenuers who also control the tourism industry and are the owners of the largest tourist company. There is nexus between the politicians and the entrepreneurs who takes away all the major gorvernment tourist projects. This group of politicians and enternprenuers, who are responsible for the development of the region, are also the people who control the maximum wealth of the region. Though the presence of oligarchy in Wakatobi has grown new businesses, created jobs and increased the number of tourists in the region, but it has also brought income inequality, land owners and labors conflicts and other problems among people of Wakatobi.

Keywords: Decentralization, Oligarchy Predator, Elite Strategic, Rural Development, Wakatobi.

DDC: 352.4

Nyimas Latifah Letty Aziz

**VILLAGE AUTONOMY AND
EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND**

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 193-211

The Law No.6 / 2014 on the village has opened up opportunities for villages to become self-sufficient and autonomous. Village autonomy is autonomous of village governments in managing the finances of the village. One program that given by the government is the village fund with the proportion of 90:10. The purpose of giving the village fund is to improve the welfare of rural communities. However, in the implementation of the use of village funds still felt not effective due to inadequate capacity and capability of the village government and not the involvement of active community participation in the management of village funds.

Keywords: village autonomy, effectiveness, village fund

DDC: 352.14

R. Siti Zuhro

**LOCAL GOVERNMENT ACT OTODA IN
NEW: ISSUES AND CHALLENGES AND
LOCAL CONNECTION**

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 213-225

After 16 years implement decentralization and regional autonomy, the results is not encouraging, particularly in relation to good local governance, local economic competitiveness, the quality of public services and the welfare of local communities. Although local government in some regions have proven capable of innovation in providing public services, the numbers are still minimal compared to the number of regions experiencing stagnation in their development. There are approximately 122 districts are still categorized as undeveloped. Law 23/2014, replacing the 34/2004 law on regional government, is legal binding on regions and is significantly more demanding of performance. Although it is still questionable, this law is expected to provide a better basis for synergy and cooperation

between regions, improved relations between center and regions, promoting innovation in public services and building social welfare.

Keywords: decentralization, local autonomy, local government, public services.

DDC: 324.23

Moch. Nurhasim

THE FUTURE OF ISLAMIC PARTIES IN INDONESIA

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 227-244

The existence of an Islamic political party is not just a marker of the flourishing plurality politics in the country, but far from it, a plurality Indonesiaan nothing without all Islama in it. Therefore iu, Islamic parties remain relevant and needed, not only as a channel for the aspirations and interests of Muslims, malainkan also as part of plurality and Indonesiaan itself. The results of this study showed that the chances of Islamic ideology and Islamic parties in the future depends on how far the Islamic ideology can be presented to answer the question Indonesiaan and nationality. Opportunities of Islamic parties on the one hand can be seen from the results electoral, but in the much more basic than it is how meningkatakn quality presence and contribution of Islamic parties for the practice of democracy in Indonesia is not only more ethical and civilized, but also more fair, accountable, and integrity.

Keywords: Party, Islamic Party, Democracy, Election

DDC: 320.962.4

Nostalgiaawan Wahyudhi

THE PROBLEMS OF THE POWER OF POLITICAL ISLAM IN MOROCCO, SUDAN AND SOMALIA

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 245-260

This research is formulated to examine the development of political Islam in Morocco, Sudan and Somalia in post Arab spring. Based on research finding in 2014, we found the phenomenon of “backward bending process” in which the political unrest and regime change in previous case studies do not lead towards democracy, but turned back to authoritarianism. The research on Morocco, Sudan and Somalia shows a unique finding that the Muslim Brotherhood (IM) has existed in these three countries. However this movement is deeply rooted in Sudan compared to the rest countries based on geographical and historical reason. Other findings are Islamic political movements have emerged as democratic opposition movements against the authoritarian regimes. This study proves that the phenomenon of ‘Arab exceptionalism’ has existed. The cultural and political systems in these three countries do not provide a sufficient space for the growth of democracy.

Keywords: Political Islam, Arab Spring, Democracy

DDC: 307.72

Yusuf Maulana

INDEPENDENCE VILLAGE BUILDING IN FRAME OF REGIONAL AUTONOMY

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 261-268

Issues surrounding the village is complex. Especially the issue of decentralization in the village are not clear, which is related to the position of the village and the expected impact of decentralization. The existence of the problem structure and function of rural government institutions are not in accordance with the needs of the village and its people. Then the problem changes in the structure and the function has not contributed to the independence of the village. How these changes could create the potential independence of the village can be awakened.

Keywords: village, decentralization, autonomy, institutional.

REVIEW BUKU
MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA DALAM BINGKAI
OTONOMI DAERAH

BOOK REVIEW
INDEPENDENCE VILLAGE BUILDING IN FRAME
OF REGIONAL AUTONOMY

Yusuf Maulana

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jln. Jend Gatot Subroto No.10, Jakarta
Email : yusuf.maulana@lipi.go.id

Judul Buku : Membangun Kemandirian Desa
Pengarang : Didik G. Suharto
Penerbit : Pustaka Pelajar
Tahun Terbit : 2016
Tebal : 288 Halaman

Diterima: 5 September 2016; direvisi: 27 September 2016; disetujui: 12 Desember 2016

Abstract

Issues surrounding the village is complex. Especially the issue of decentralization in the village are not clear, which is related to the position of the village and the expected impact of decentralization. The existence of the problem structure and function of rural government institutions are not in accordance with the needs of the village and its people. Then the problem changes in the structure and the function has not contributed to the independence of the village. How these changes could create the potential independence of the village can be awakened

Keywords: *village, decentralization, autonomy, institutional.*

Abstrak

Persoalan yang melingkupi desa cukup kompleks. Terutama persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun

Kata Kunci : Desa, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kelembagaan.

Pendahuluan

Disahkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa seakan menjadi akhir penantian dan perjuangan panjang dari segenap elemen desa. Ribuan kepala desa, perangkat desa, dan aktivis

pro-desa lainnya tak pernah lelah melakukan pergerakan, baik melalui forum-forum ilmiah hingga aksi jalanan, baik di daerah maupun berdemonstrasi ke Jakarta untuk mendesak pengesahan undang-undang desa.

Latar belakang dibentuknya UU Desa tersebut berangkat dari adanya anggapan bahwa pembangunan nasional justru menciptakan kesenjangan antara desa dan kota. Pembangunan yang bias perkotaan semakin memperbesar disparitas antara kota dan desa. Negara berkembang, termasuk Indonesia lebih mengkonsentrasikan pembangunan ekonomi pada sektor industri untuk mengejar pertumbuhan. Ini mengakibatkan pembangunan hanya terpusat di kota dan kepentingan masyarakat desa terkesampingkan.

Sementara masalah yang terjadi di desa yang hingga saat ini terjadi memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku sejak Indonesia merdeka hingga kini di Era Reformasi terbukti belum menjadi sebuah sistem yang konsisten dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa. Kompleksitas persoalan tersebut berakar pada persoalan seputar pelaksanaan desentralisasi, khususnya penyelenggaraan pemerintah desa.

Dari sisi kelembagaan, pengaturan mengenai desa cenderung mengalami penurunan kualitas dalam aspek demokratisasi. Persoalan penurunan kualitas demokratisasi paling nampak terjadi pada institusi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Institusi yang mencerminkan demokrasi desa mengalami erosi kelembagaan. BPD mengalami penurunan posisi legal formal kedudukan dan peranan yang terlihat dan tidak tegasnya kedudukan BPD sebagai lembaga legislatif desa dan mekanisme pengisian keanggotaan BPD yang semula dipilih langsung menjadi ditetapkan secara musyawarah mufakat berdasar perwakilan wilayah¹.

Beragam persoalan pemerintah desa itu pada intinya bersumber kepada struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang masih bermasalah. Untuk menentukan struktur dan fungsi kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau organisasi pemerintah desa itu sendiri tidak mudah. Secara teoritis, belum ada pedoman atau ukuran-ukuran baku yang mengidentifikasi struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang sesuai kebutuhan masyarakat/organisasi. Juga belum

ada pengelompokan bentuk atau klarifikasi desa sebagai wujud keberagaman karakteristik desa yang bisa diterima luas.

Perspektif umum dari buku ini berpandangan bahwa faktor struktural dan fungsional kelembagaan desa dinilai memiliki pengaruh besar menjembatani sejumlah persoalan yang telah diuraikan di atas. Solo Soemardjam selalu menyoroti betapa sulitnya menempatkan posisi dan format desa. Pendapatnya adalah sebagai berikut :

“Mengenai pembentukan daerah-daerah administratif pada umumnya tidak dijumpai masalah-masalah yang berarti, baik secara hukum maupun politis. Sebaliknya menghadapi desa, negeri, marga dan sebagainya yang diakui sebagai daerah istimewa tampaknya ada berbagai pendapat yang berbeda-beda yang sampai sekarang belum dapat disatukan dengan tuntas. Perbedaan pendapat itu mengakibatkan keragu-raguan pemerintah untuk memilih antara sistem desentralisasi dua tingkat, yaitu dengan daerah otonom tingkat I dan tingkat II ditambah tingkat III”²

Desentralisasi Pemerintahan Daerah dalam UU Desa

Dalam desentralisasi yang dianut oleh NKRI, pelaksanaan pada pemerintah desa selama ini belum nampak jelas, terutama posisi desa dan dampak desentralisasi yang dihasilkan. Kebijakan desentralisasi seharusnya mampu menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di pemerintah desa. Dalam sistem desentralisasi, pemerintahan di level bawah (daerah dan desa) sudah sepatutnya diberikan kewenangan-kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Demikian pula hubungan antar pemerintahan, yang termanifestasi dalam hubungan desa dengan supra-desa, logikanya dapat mewujudkan hubungan antara ordinat dan sub-ordinat yang harmonis sehingga tercapai kemandirian desa.

Merujuk pada pendapat Norton, desentralisasi kepada desa dapat dibenarkan tetapi harus melihat sejauh mana partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah adalah

¹ Didik Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 3

² Ditjen PMD Depdagri, *Naskah Akademik RUU tentang Desa*, 2007, hlm. 17

melakukan desentralisasi pada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil di daerah tersebut (*decentralization within cities*). Tujuannya untuk memungkinkan masyarakat mengartikulasikan atau menyampaikan kebutuhan mereka, membawa kekuasaan lebih dekat dengan rakyat, dan menarik berbagai partisipan ke dalam sistem politik.³

Menurut Suharto desentralisasi dapat dikelompokkan dalam dua definisi, yaitu definisi dari perspektif administrasi dan perspektif politik. Persepektif desentralisasi politik menerjemahkan desentralisasi sebagai devolusi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; sedangkan persepektif desentralisasi administrasi diartikan sebagai pendelegasian wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.⁴

Implementasi kebijakan desentralisasi akan melahirkan pemerintahan lokal di negara yang bersangkutan.⁵ Sebagai instrumen desentralisasi, pemerintah lokal memiliki peran lain. *Pertama*, pemerintah lokal dapat menjadi senjata yang efektif untuk menyalurkan tekanan lokal, menyatakan dan menyatukan kepentingan lokal. *Kedua*, pemerintah lokal dapat lebih memberikan suatu pelayanan secara efisien daripada pemerintah pusat. *Ketiga*, pemerintah lokal dapat merencanakan, dengan pemahaman yang jauh lebih baik atas persoalan yang ada di wilayahnya, berbagai rancangan untuk kemajuan sosial, ekonomi dan sumber daya manusia yang lebih efisien daripada pemerintah nasional. *Keempat*, pemerintah lokal dapat memastikan pertanggungjawaban yang lebih baik tentang pejabat publik kepada para warga kota, karena mereka lebih dekat dengan masyarakatnya. *Terakhir*, pemerintah lokal dapat menjadi saluran komunikasi yang lebih efektif untuk memastikan berjalannya kebijakan pemerintah pusat dengan baik.

Merujuk dari negara-negara di kawasan Eropa barat, dimana desa cenderung dilihat sebagai lembaga-lembaga administratif berbasis

komunitas teritorial sebagai bagian alami dari suatu kesatuan organ di dalam aspek-aspek politik masyarakat dan menekankan harapan tentang solidaritas di dalam dan antar masyarakat. Negara-negara *Anglophone* cenderung menganut pandangan instrumental dan pragmatis tentang pemerintah yang memandang kepentingan nasional tidak lebih dari sekadar hasil persaingan kepentingan swasta. Di Eropa Barat mencerminkan sikap non-ekonomis dan non-utilitarian terhadap hubungan politik. Di Eropa Barat Pemerintah pusat menganggap pemerintah daerah memperoleh legitimasi dari masyarakat daerah. Konsep-konsep dan nilai-nilai dibentuk oleh filsafat sosial, moral dan politik yang diekspresikan melalui saluran politik telah memainkan sebuah peranan penting.⁶

Sementara dalam konstitusi di Indonesia, posisi pemerintahan daerah sangat kuat, karena tercantum dalam UUD 1945. Pasal 18 UUD RI 1945 menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur undang-undang”. Aturan turunan dari pasal tersebut adalah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyangkut asas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Di pasal 5 ayat (4) disebutkan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Menariknya, pada UU Desa No. 6 Tahun 2014 ini, yang lebih dahulu dibentuk adalah UU Desa, baru setelah UU Desa disahkan barulah UU pemerintah daerah yang disahkan. Pada UU pemerintahan daerah sebelumnya yaitu UU No. 32 tahun 2004, pemerintah daerah hanya berhenti pada pemerintah kabupaten/kota, di mana desa bukan merupakan unsur dalam pemerintahan daerah. Sedangkan pada UU pemerintah daerah yang baru yaitu UU No. 23 tahun 2014, posisi desa dimasukkan ke dalam bagian dari pemerintahan daerah yang mempunyai asas rekognisi sebagai pengakuan adanya pemerintahan desa.

Menyangkut sumber pendapatan desa, ketentuan pada masa lalu dan era UU No.

³ Alan Norton, "Internasional Handbook of Local and Regional Government, (UK: Edward Elgar Publishing, 1997), hlm. 106-107

⁴ Didik Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, hlm. 36

⁵ Bambang Supriyono, "Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Masyarakat Kultural", (Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 13

⁶ Didik Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, hlm. 42

32/2004 berbeda dibanding UU No. 6 2014 yang berlaku sekarang. Pendapatan desa sekarang meliputi sumber: (a) pendapatan asli desa (PADesa), (b) alokasi anggaran dan pendapatan belanja negara, (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, (d) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, (e) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota, (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan (g) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sementara pada masa UU No. 32 tahun 2004, sumber pendapatan desa meliputi PADesa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota dan sumbangan pihak ketiga. Pada masa lalu, penghasilan dapat dibagi menjadi lima macam, kalau dipandang dari sudut penyelenggaraan rumah-tangga desa, yaitu: tenaga warga-desa atau tebusannya berupa uang, hasil usaha di lapangan pertanian yang berupa barang atau uang, hasil perusahaan desa, penghasilan yang langsung di peruntukan membayar kepala dan pemerintah desa, serta pajak desa, urunan desa, dan subsidi pemerintah pusat.

Masuknya negara dan pengaruh sistem administrasi modern mendorong perubahan terhadap sistem pemerintahan desa dan pranata-pranata sosial yang ada dalam komunitas masyarakat. sementara di daerah ada beberapa isu kritis tentang pemerintahan desa: (a) kedudukan dan kewenangan desa; (b) perencanaan pembangunan desa; (c) keuangan desa; (d) demokrasi desa, khususnya tentang posisi dan peran badan permusyawaratan desa; serta birokrasi desa. Senada dengan pendapat tersebut, pendapat lainnya menguraikan isu-isu kritis yang terkandung dalam otonomi desa yang selama ini dalam perhatian.

Pertama, adalah isu ketatanegaraan dan pemerintahan. Kedudukan dan kewenangan desa menjadi titik sentral dalam semesta pembicaraan tentang otonomi desa. *Kedua*, isu adat dan lokalisme, hampir semua masyarakat berusaha mempertahankan pemerintahan adat itu ada pada saat yang sama pemerintah berupaya

melakukan intervensi dan modernisasi terhadap pemerintahan adat agar sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional. *Ketiga*, isi ekonomi politik. Tarik menarik antara pemerintah dengan masyarakat lokal yang terus menerus berlangsung sebenarnya merupakan bentuk pertarungan antara negara dan modal dengan masyarakat lokal memperebutkan kuasa atas tanah dan penduduk. *Keempat*, desa umumnya mempunyai keterbatasan sumber daya lokal. Berdasarkan kalkulasi nominal, desa umumnya mempunyai keterbatasan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi desa, dan lain-lain.⁷

Menata kelembagaan menuju

kemandirian desa

Untuk mengkaji struktur dan fungsi suatu organisasi atau lembaga, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai bagian-bagian pokok dari organisasi. Suharto menawarkan konsepsi Henry Mintberg tentang lima bagian pokok dari organisasi relevan diketengahkan. Dimana Mintzberg menjelaskan, pada bagian dasar terdapat *operating core*, di mana operator menjalankan pekerjaan pokok organisasi baik *input* maupun *output*, hal tersebut identik dengan dinas daerah dan kecamatan. Bagian tengah ada *middle line* yang bertugas mengoperasionalkan strategi yang dibangun, hal ini identik dengan sekretaris daerah. Dan di bagian tertinggi terdapat *strategic apex* yang bertugas melakukan supervisi langsung, melakukan hubungan dengan lingkungan, dan pengembangan strategi, hal tersebut identik dengan kepala daerah.⁸

Sementara dalam mengkaji kelembagaan pemerintahan desa, dipandang tepat untuk mencermatinya dari perspektif pembangunan lembaga (*institution building*). Model pembangunan lembaga adalah suatu teori elitis dengan suatu prasangka rekayasa sosial yang eksplisit. Perubahan-perubahan terjadi dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, dan perubahan-perubahan tersebut dipimpin oleh orang-orang yang sampai batas tertentu memiliki wewenang atau sanksi resmi. Wahana perubahannya adalah organisasi formal yang mungkin birokratis

⁷ Didik Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, hlm. 60

⁸ *Ibid.*, hlm. 75

sifatnya, yang mengumpulkan kemampuan-kemampuan teknis dan komitmen-komitmen nilai yang diperlukan untuk mengadakan inovasi dan untuk mendorong dan melindungi mereka dalam lingkungan yang relevan untuk organisasi. Lingkungannya adalah sekumpulan organisasi atau kelompok, yang masing-masing bekerja komunikasi-komunikasi intern, sehingga informasi dapat bergerak dengan cepat dan karenanya memperlancar tindakan yang lebih cepat dan rasional dan dalam sumber-sumber dukungan sosial. Pembangunan yang efektif sangat perlu bagi modernisasi dan pembangunan bangsa.

Kemandirian dalam pembangunan desa erat kaitannya dengan otonomi daerah, dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif. Secara teoritik, jika desa terlepas dari intervensi negara maka aplikasi kekuasaan dan kewenangan yang telah didesentralisasikan berlangsung lebih leluasa. Asumsinya, dalam keadaan berlangsungnya otonomi, desa memperoleh kewenangan yang lebih besar di tangan politisi lokal, dan tersedia ruang pemberdayaan *civil society* di desa. Kekuasaan besar yang dimiliki politisi lokal akan bermanfaat bagi pengembangan desa jika disertai kapasitas yang memadai dan kesadaran serta tanggung jawab politik yang besar pula. Dalam pandangan tersebut, otonomi desa menjadi prinsip dasar yang harus dikembangkan.

Berdasarkan perspektif pemerintahan daerah, kemandirian dalam pengelolaan kewenangan daerah adalah dasar untuk mewujudkan efisiensi, akuntabilitas, pengendalian, dan otonomi. Kemandirian dalam pengelolaan dapat terwujud apabila memenuhi beberapa prinsip. *Pertama*, pengambilan keputusan harus terjadi pada tingkatan terendah pemerintahan yang konsisten dengan tujuan efisiensi alokasi sumber daya. *Kedua*, keselarasan batasan politik dengan kemanfaatan atau keuntungan yang diperoleh, untuk itu diperlukan yuridiksi untuk setiap jenis layanan publik. *Ketiga*, kejelasan yuridiksi yang berkaitan dengan kewenangan pusat dan daerah menyangkut penyediaan setiap barang publik harus disediakan dengan batasan yuridiksi yang jelas melalui kontrol yang bersifat terbatas.

Keempat, belanja dan fungsi regulasi harus berada pada tingkatan pemerintahan terendah.⁹

Pendapat lain menyatakan bahwa jika hendak memahami dan mendesain otonomi desa secara lebih maksimal maka otonomi desa bukan sesuatu yang asli dan lokalistik, tetapi otonomi desa yang sepadan dengan otonomi daerah sebagai implikasi dari desentralisasi. Otonomi desa dalam konteks desentralisasi berarti menempatkan desa sebagai *local self-government*, bukan sekadar *self-government community* yang asli. Apabila mengikuti skema desentralisasi antara *self-governing community* dan *self-government* bukan dua status desa yang bertentangan. Prinsip dasar pertama, desentralisasi merupakan bentuk pengakuan negara terhadap *self-governing community*, dan prinsip selanjutnya adalah pembagian kewenangan dan keuangan kepada desa untuk membuat desa sebagai *local self-government*.¹⁰

Dalam memandang kemandirian desa, Suharto membatasi dalam dua pokok persoalan, Pertama, Kemandirian administratif/ekonomi yang memandang tingkat kemandirian dapat diamati dari proporsi Pendapatan Asli Desa (PADesa) dibanding pendapatan desa secara keseluruhan. Kontribusi desa terhadap seluruh pendapatan desa pada umumnya masih sangat minim dan terbatas.¹¹ Sumber pendapatan desa dari dulu hingga sekarang relatif tidak memberikan pendapatan bagi desa secara signifikan. Ketidakmampuan untuk meningkatkan pendapatan desa tersebut dikarenakan potensi komponen sumber pendapatan desa relatif kurus atau dengan kata lain tidak memberikan hasil optimal. Mayoritas pendapatan desa dalam APBDes berasal dari sumbangan/bantuan dari pemerintah supra-desa. Kenyataan sebaliknya terjadi dalam hal kemandirian masyarakat. Masyarakat relatif mandiri dalam membangun desa, yang dibuktikan dari antusiasme masyarakat untuk berswadaya.

⁹ Supriyono, *Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Masyarakat Kultural*, hlm. 35

¹⁰ Eko Sutoro dan Abdul Rozaki, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, (Yogyakarta: Ire Press, 2005), hlm. 45

¹¹ Didik Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, hlm. 84

Kedua, kemandirian politik desa antara lain dapat dilihat dari proses rekrutmen/pembinaan aparatur, pertanggungjawaban aparatur, perwujudan hak-hak politik/partisipasi masyarakat, kemandirian dalam pembuatan kebijakan, kebebasan dalam mengekspresikan asal-usul desa dan adat istiadat. Kemandirian politik di desa sangat dipengaruhi karakteristik pemerintah desa dan BPD. Dari sisi kuantitas maupun kualitas, realitas kondisi aparatur pemerintah amat terbatas. Struktur pemerintahan desa yang lemah secara kualitas menjadi hambatan pelayanan bagi warga masyarakat dan peningkatan kinerja organisasi. Semakin tidak mampu pemerintah desa menyelesaikan tugasnya, maka dorongan terhadap keberhasilan kemandirian desa juga akan cenderung semakin tergantung kepada pemerintah tingkat di atasnya.

Dari analisis kondisi kemandirian desa yang disampaikan, ada berapa faktor yang mempengaruhi kemandirian desa. Secara umum, kedudukan dan kewenangan desa masih sangat terbatas. Kapasitas pemerintahan desa dipandang juga belum mampu menyelenggarakan urusannya dengan maksimal. Desa dihadapkan kepada permasalahan pengorganisasian, sumber daya manusia dan pendanaan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. Di pihak lain, pemerintahan supra-desa serasa enggan berbagi kekuasaan dan sumber daya dengan desa.

Faktor internal yang mempengaruhi kemandirian desa adalah kapasitas sumber daya manusia, manajemen pemerintahan termasuk kepemimpinan kepala desa. Kekompakan internal pemerintah desa dan eksistensi lembaga-lembaga desa merupakan tantangan sekaligus persoalan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Perubahan struktur dan fungsi kelembagaan desa berpotensi menimbulkan ketidaksolidan internal pemerintah desa. Manajemen pemerintahan yang kurang tertata menyebabkan pemerintah desa kurang bisa mendorong pemerintahan desa.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kemandirian desa adalah faktor regulasi yang banyak mempengaruhi pola kemandirian atau ketergantungan desa. Penulis banyak mengupas kemandirian desa dengan membandingkan antara periode UU No. 32

tahun 2004, UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1979 di mana perubahan regulasi tersebut melahirkan perubahan atas unsur atau komponen pemerintahan desa. Perubahan status aparatur desa seperti sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS), aturan tentang kades terutama soal penghasilan dan masa jabatan kepala desa, dan pengaruh terhadap keuangan desa. Poin-poin tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi struktur kemandirian desa.

Untuk mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian desa dikaitkan dengan struktur dan fungsi kelembagaan desa, penulis menawarkan teori strukturisasi dari Giddens, struktur dipandang sebagai aturan-aturan dan sumber daya yang terlibat secara terus menerus dalam reproduksi sosial; unsur-unsur terlembagakan sistem sosial memiliki kelengkapan-kelengkapan struktural dalam pengertian bahwa hubungan-hubungan distabilkan di sepanjang masa dan ruang.¹² Komposisi antara para agen dan struktur-struktur bukanlah dua perangkat fenomena-fenomena tertentu yang saling terpisah atau sebuah dualisme, melainkan mewakili sebuah dualitas. Menurut Giddens, salah satu proposisi utama teori strukturisasi adalah aturan-aturan dan sumber daya yang dilibatkan dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial sekaligus merupakan sarana-sarana reproduksi sistem (dualitas struktur). Struktur sebagai perangkat aturan dan sumber daya yang terorganisasikan secara rutin berada di luar ruang dan waktu.¹³ Sebaliknya sistem sosial yang secara rutin melibatkan struktur terdiri dari aktivitas-aktivitas tertentu para agen manusia dan reproduksi di sepanjang ruang dan waktu.

Didik Suharto di akhir pembahasannya melengkapi kajian dengan sebuah model rekomendasi dalam membangun kemandirian desa. *Pertama*, Penekanan desentralisasi hingga ke tingkat desa. Jika selama ini kewenangan desa hanya terkait dekonsentrasi dan tugas pembantuan, direkomendasikan perlu lebih besar kewenangan urusan berdasar asas desentralisasi di desa dan diberikan otonomi yang lebih besar. *Kedua*, arah

¹² *Ibid.*, hlm. 239-240

¹³ Anthony Giddens, *Teori Strukturisasi; Dasar-Dasar Pembentukan Struktural Sosial Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

desentralisasi yaitu: kebebasan bertanggung jawab, desentralistik, semi hierarkis, *local democracy model*, keberagaman, dan kesadaran partisipatif harus terus ditingkatkan. *Ketiga*, pemerintahan supra-desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa idealnya tidak mengulangkan kedaulatan desa. *Keempat*, kedudukan desa perlu diperjelas dan diperkuat. Perlu ada kapasitas lokal yang memadai dan peluang kepada desa untuk mandiri. *Kelima*, dalam hal struktur kelembagaan, struktur pemerintahan desa sebaiknya didesain lebih fungsional, adaptif, dan sederhana tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Penutup

Buku yang mengangkat isu mengenai kemandirian desa yang ditulis oleh Didik Suharto ini dengan jelas menggambarkan persoalan yang dihadapi desa. Dia melihat terdapat persoalan serius ketika kebijakan sistem pemerintahan desa yang telah mengalami perubahan beberapa kali, tetapi implikasi nyata bagi kemakmuran desa dirasa masih belum terlihat. Dalam konteks seperti ini, kebijakan terkait sistem pemerintahan desa perlu di evaluasi. Kemandirian desa menjadi titik tolak sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Penulis buku ini mencoba memotret dan menganalisis kemandirian desa itu dari sudut pandang kebijakan publik, terutama saat berlakunya perundang-undangan tentang desa yang berubah-ubah di mana cukup memberi warna bagi proses penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini.

Dari ulasan bab-bab di buku ini, dapat ditarik benang merah bahwa terdapat sejumlah persoalan strategis yang dihadapi desa. Pertama, dan menjadi hal mendasar adalah terkait kedudukan desa. Tanpa menafikan faktor kelemahan yang bersumber dari internal desa seperti kualitas/ kuantitas SDM dan sarana/prasarana pemerintah desa, stagnasi atau kelambatan pembangunan desa amat dipengaruhi oleh pemerintah supra-desa dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Realitas bahwa kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa belum bisa terwujud selama

ini terutama disebabkan oleh tidak jelasnya atau lemahnya posisi desa dalam sistem pemerintahan nasional. Eksistensi desa hampir-hampir tidak diakui, dipandang sebelah mata, dan bahkan sering dianggap sebagai sumber masalah. Sehingga dari perspektif regulasi maupun perilaku pemerintahan di tingkat atas (supra-desa), cenderung dipinggirkan. Akibatnya, desa kurang diperhatikan dan tidak diberikan posisi yang kuat.

Mencermati substansi isi dari UU No.6 tahun 2014 serta dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya (UU No. 32 tahun 2004) terlihat bahwa secara normatif desa semakin diberikan kesempatan untuk otonom. Kesempatan otonomi desa yang kian besar, termasuk dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan, memberikan harapan baru akan terwujudnya kemandirian desa di masa depan. Harapan sekaligus tantangan dalam UU No.6 tahun 2014 tersebut memerlukan kerja keras dan komitmen dari para *stakeholders*, termasuk pemerintahan supra-desa, untuk mengimplementasikan dan mewujudkannya. Tanpa itu, harapan baru dari UU No. 6 Tahun 2014 tidak akan membawa makna berarti bagi kemandirian desa.

Namun dalam buku ini belum begitu terlihat bagaimana posisi desa dalam menghadapi undang-undang desa yang baru dan peluang desa menuju kemandirian politik, sosial dan ekonomi, dimana penulis lebih mengedepankan perjalanan kebijakan desa sejak Negara Indonesia berdiri hingga sebelum implementasi UU No.6 Tahun 2014. Padahal buku ini terbit pada tahun 2016, dimana UU Desa yang baru disahkan pada tahun 2014. Seharusnya pembahasan mengenai UU Desa yang baru tersebut lebih komprehensif dibahas penulis dalam buku ini.

Daftar Pustaka

- Ditjen PMD Depdagri. *Naskah Akademik RUU tentang Desa*. Jakarta; Kemendagri. 2007.
- Eko, Sutoro dan Abdul Rozaki. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press. 2005.

- Giddens, Anthony. *Teori Strukturalisasi; Dasar-Dasar Pembentukan Struktural Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norton, Alan. *Internasional Handbook of Local and Regional Government*. UK: Edward Elgar Publishing. 1997.
- Suharto, Didik. *Membangun Kemandirian Desa*. Jakarta : Pustaka Pelajar. 2016.
- Supriyono, Bambang. *Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Masyarakat Kultural*. Malang: Universitas Brawijaya. 2010.

TENTANG PENULIS

Ahmad Helmy Fuady

Merupakan peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI). Penulis dapat dihubungi melalui email: elhelmy@yahoo.com

Eka Suaib

Menyelesaikan S3 di jurusan Ilmu Politik universitas Airlangga, Surabaya dengan judul disertasi “Etnisitas Kebijakan Publik (Studi Kompetisi Etnis dalam Politik Lokal Kota Kendari). Saat ini bekerja sebagai Dosen FISIP Universitas Haluoleo, Kendari. Pada tahun 2008-2013 menjabat sebagai komisioner KPU Sulawesi Tenggara. Penulis juga pernah menjabat sebagai ketua HMI cabang Kendari. Telah menghasilkan tulisan-tulisan yang dimuat di media lokal, jurnal nasional dan internasional, juga diterbitkan dalam bentuk buku. Salah satu artikel dalam jurnal internasional terbarunya berjudul “Pengaruh Vote Buying terhadap perilaku pemilih dalam Pemilu Legislatif di Kota Kendari, dan Pemilu Pilkada Kabupaten Konawe Selatan”. Email: ekasuaib1966@gmail.com

Irhamna Irham

Merupakan mahasiswa di Universitas Indonesia Depok-Jawa Barat. Penulis dapat dihubungi melalui email: irhamna.irham@gmail.com

Kadek Dwita Apriani

Mahasiswa di Universitas Udayana, Denpasar-Bali. Penulis dapat di hubungi melalui email: kadek88@gmail.com.

Kurniawati Hastuti Dewi

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta. Penelitian yang menajdi fokus kajiannya adalah gender dan politik, gender dan kebijakan desentralisasi, politik kebijakan

sosial, gender dan perubahan iklim, kajian hak-hak asasi perempuan dan anak, kepemimpinan perempuan, Islam dan Demokratisasi di Indonesia dan Asia Tenggara. Gelar MA diperoleh penulis dari *Faculty of Aian Studies* Australian National University (ANU) tahun 2007. Gelar doctor dalam bidang Area Studies Kyoto University Jepang diperolehnya tahun 2012. Disertasi Doktoralnya memenangkan pendanaan dari International Program of Collaborative Research Center of Southeast Asian Studies Kyoto University dan Kyoto University President’s Special Fund, diterbitkan menjadi buku berjudul *Indonesian Woman and Local politics: Islam, Gender and Networks in Post-Soeharto Indonesia* (Singapore: National University of Singapore Press and Kyoto University Press, 2015). Email: kurniawati.dewi@yahoo.com

La Husen Zuada

Penulis adalah alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. saat ini menjadi Dosen di FISIP Universitas Halu Oleo, Kendari. Penulis juga aktif menulis di harian lokal yang menyangkut isu tentang partai politik, pemilu dan desentralisasi. Sering juga diundang menjadi narasumber diskusi public di tingkat lokal Sulawesi Tenggara tentang Kepemiluan. Email: husenzuadaui@gmail.com

Moch. Nurhasim

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 jurusan Ilmu Politik di Universitas Airlangga dan s2 bidang politik di Universitas Indonesia dengan tema tesis masalah perdamaian di Aceh. Peneliti yang pernah ditekuni adalah terkait konflik di berbagai daerah, masalah pedesaan, pemilihan umum, dan masalah kemiliteran. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Jakarta. Email: hasim_nur@yahoo.com

Nostalgiaawan Wahyudi

Menamatkan S1 Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Ilmu Politik (Hubungan Internasional) di International Islamic University Malaysia. Sejak tahun 2014, penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI dan tergabung dalam tim penelitian Islam dan Demokrasi. Email: wan_jauzy@yahoo.com

Nyimas Latifah Letty Aziz

Penulis menamatkan SI di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Saat ini menjadi salah satu peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak tahun 2005, dengan fokus kajian penelitian otonomi daerah dan isu-isu ekonomi politik. Email: nyim001@lipi.co.id

R. Siti Zuhro

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana di bidang Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari the Flinders University, Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Australia. Sebagai peneliti senior, Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis

diantaranya Demokratisasi Lokal; Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Ombak, 2009), Demokratisasi Lokal; Peran Aktor dalam Demokratisasi (Yogyakarta: Ombak, 2009); Kisruh Perda: Mengurai Masalah dan Solusinya (Yogyakarta: Ombak, 2010) dan lainnya. Email: wiwieqsz@yahoo.com.au

Waode Syifatu

Merupakan mahasiswa di Universitas Halu Oleo. Penulis dapat dihubungi melalui email di: waode.syifatu@gmail.com

Yusuf Maulana

Sejak tahun 2015, Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Gelar S1 diperolehnya dari Universitas Padjajaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara. Email: yusufmaulana1987@yahoo.com

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

